

Hanover  
and Tyke

# LAPORAN KINERJA

YEAR  
2023



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

LAKIP DISDUKCAPIL

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (Keempat) dalam masa RENSTRA Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil LAKIP Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2023-2026).

Laporan kinerja (Akuntabilitas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Komitmen dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 1 (satu) indikator

kinerja utama,terdapat 1 (*satu* indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih  
Malili, 26 Februari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan  
Dan Pencatatan Sipil,



**Oksen Bija, SH**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19651025 199610 1001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2023 .

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EXSECUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi .....	1
C. Mandat dan Peran Strategis.....	9
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis.....	12
B. Priotas Nasional .....	13
C. Tujuan .....	18
D. Sasaran.....	19
E. Program untuk Pencapaian sasaran .....	21
F. Perjanjian Kinerja 2023 .....	22
G. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS .....</b>	<b>25</b>
A. Capaian Kinerja .....	25
B. Analisis Capaian Kinerja .....	26
C. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Anggaran.....	43
D. Rekomendasi Tindaklanjut .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Pegawai kualifikasi Pendidikan pangkat dan golongan .....	6
1.2. Jumlah Pejabat Struktural/eselon berdasarkan kualifikasi pendidikannya .....	7
2.1.Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil priode 2021-2026 .....	13
2.2.Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	18
2.3.Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..	20
2.4.Program Pencapaian sasaran Tahun 2023 .....	21
2.5.Perjanjian Kinerja Tahun2023 .....	22
3.1.Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2023 .....	25
3.2.Analisis Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja.....	26
3.3.Keterangan Rentang Nilai Survei Kepuasan Masyarakat .....	28
3.4.Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...	29
3.5.Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	30
3.6.Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk .....	33
3.7.Perbandingan Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan Tahun 2021,2022 s.d 2023.....	33
3.8.Kinerja Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis .....	34
3.9.Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional .....	34
3.10.Analisis Perbandingan Antara Target Sasaran Penunjang Urusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	36
3.11.Analisis Perbandingan Antara Target Tahun Sebelumnya Sasaran Penunjang Urusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	38
3.12. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Perbandingan Menengah.....	38

3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	42
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender .....	5
1.2. Presentase Menurut PNS Jenjang Pendidikan Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi.....	8
3.1. Presentase Menurut PNS Jenjang Pendidikan Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi .....	42
3.2. Presentase Menurut PNS Jenjang Pendidikan Tugas dan Fungsi dan struktur Organisasi .....	42

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan Kegiatan di bidang pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
4. Melaksanakan Kegiatan Ketatausahaan.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

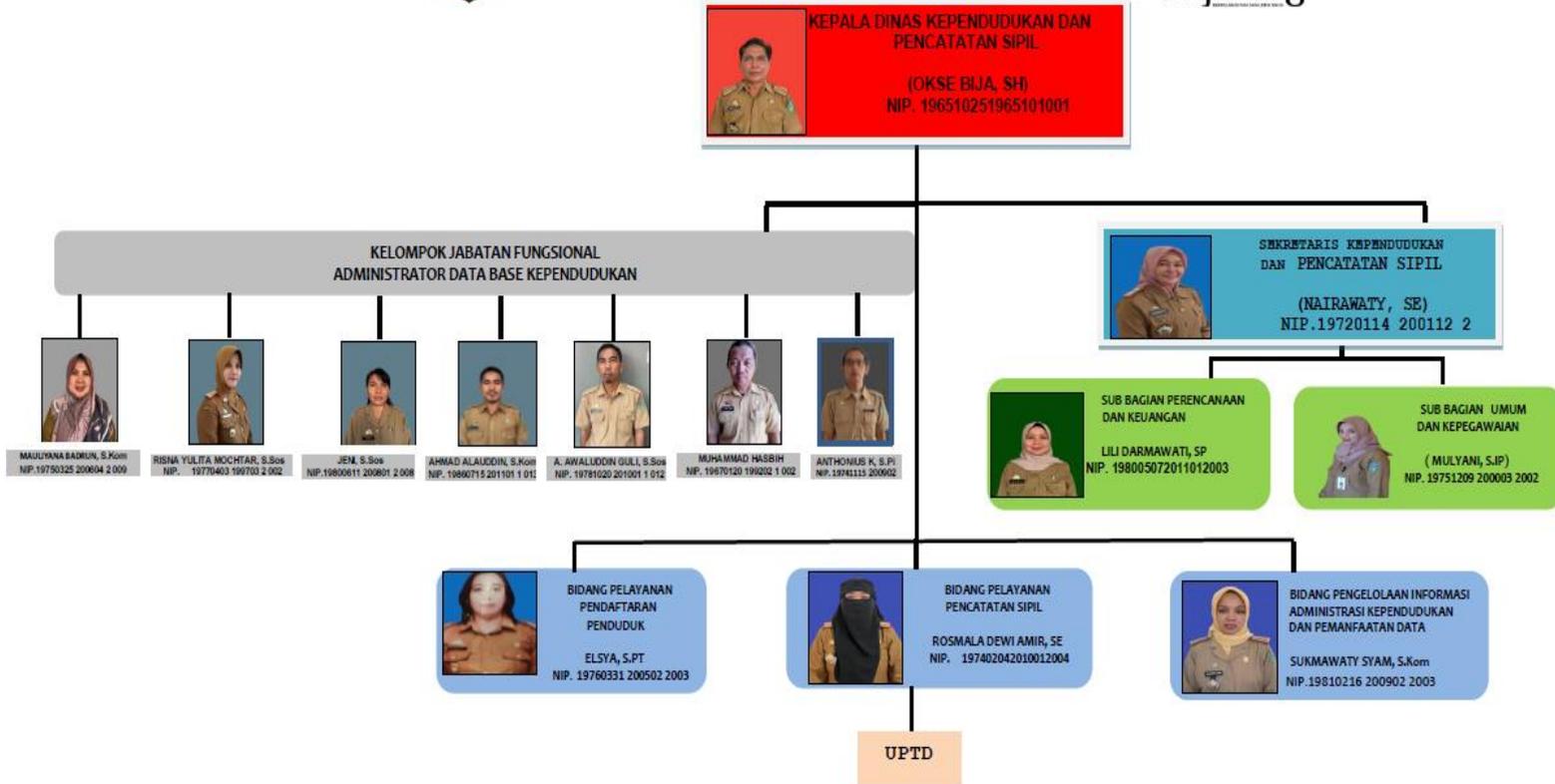
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat:
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk :
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
  3. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil :
  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi :
  1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  2. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Timur, terdiri atas:

- I. Kepala Dinas : Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Sekretariat :
  - Subbagian : Perencanaan dan Keuangan
  - Subbagian : Umum dan Kepegawaian
- III. Bidang : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - Seksi : Identitas penduduk
  - Seksi : Pindah Datang Penduduk
  - Seksi : Pendataan Penduduk
- IV. Bidang : Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Seksi : Kelahiran
  - Seksi : Perkawinan dan Perceraian
  - Seksi : Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
- V. Bidang : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
  - Seksi : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - Seksi : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  - Seksi : Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- VI. Kelompok jabatan fungsional :-



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR



### KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Untuk mendukung tugas dan fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana disebutkan di atas, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur memiliki pegawai sejumlah 55 org terdiri dari 1 Orang Kepala Dinas, 1 orang sekretaris 3 orang kepala bidang, 2 orang kepala sub bagian, 9 orang kepala seksi dan pejabat pelaksana berjumlah 4 orang dan 35 orang tenaga upah jasa. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dan golongan dan jabatan dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gender terdiri dari :

a. Pejabat Struktural berjumlah 16 orang dengan rincian :

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 orang, terdiri dari 4 orang perempuan
- Eselon IV : 2 (dua) Orang Perempuan
- Fungsional : 7 (tujuh) Orang terdiri dari 4 Laki Laki dan 3 (tiga) Perempuan

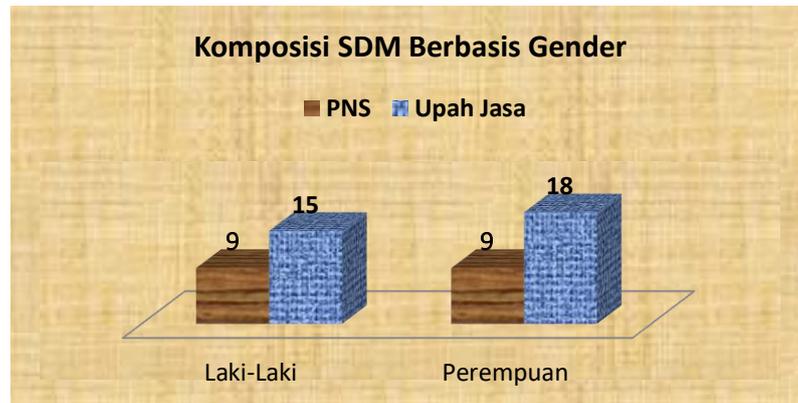
b. Staf berjumlah 4 orang dengan rincian :

- Golongan III : 3 orang, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 (satu) Perempuan
- Golongan II : 1 orang, terdiri dari 1 (satu) perempuan

c. Upah Jasa berjumlah 35 Orang dengan rincian :

- Sopir : 1 Orang, terdiri dari 1( satu) laki-laki,
- Operator Siak : 34 Orang, terdiri dari 13 laki-laki, 21 Perempuan
- Security : 2 Orang, Terdiri dari 2 (dua) laki-laki
- Cleaning Service: 2 Orang , terdiri dari 1 (satu) laki laki dan 1 (satu) perempuan

**Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender**



❖ **Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan**

Jumlah pegawai keseluruhan PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Akhir Desember 2022 adalah 18 Orang dengan Klasifikasi data pegawai menurut golongan sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 2 orang
- Golongan III sebanyak 15 Orang
- Golongan II sebanyak 1 orang

Dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut 18 Orang dengan klasifikasi data Pegawai menurut jenjang pendidikan menurut Golongan sebagai berikut :

- Golongan IV, Berjumlah 3 Orang ,Pendidikan S1
- Golongan III sebanyak 15 Orang, Pendidikan S1
- Golongan II sebanyak 1 Orang, Pendidikan D3 dan SLTA

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023**

No.	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	IV	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
2	III	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
3	II	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
4	CPNSD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
5	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	Upah Jasa	-	-	9	15	-	2	7	5	1	0	0	0	17	22

**Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023**

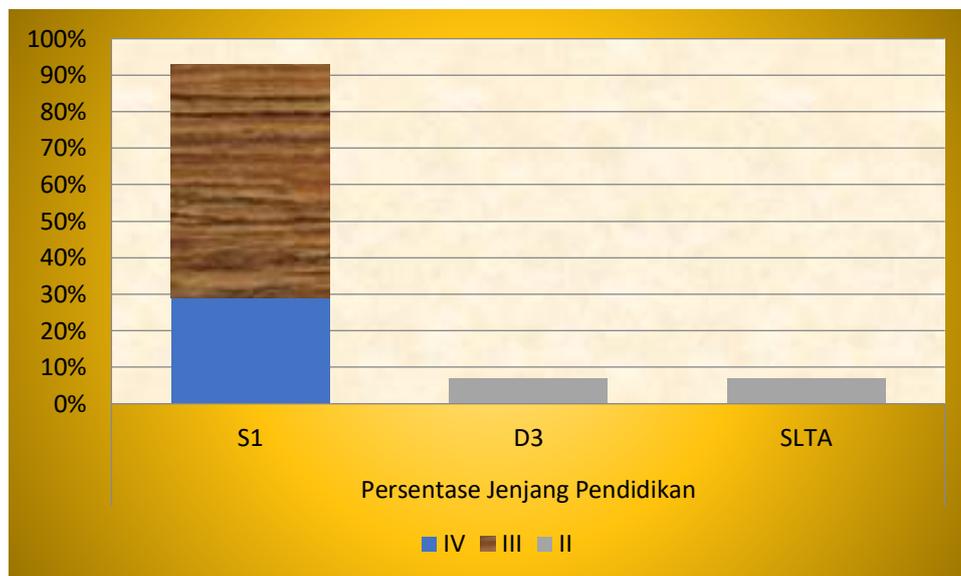
**TABEL 1.2. JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL/ESELON BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023**

No.	Pejabat Struktural/Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												TOTAL		
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	II-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II-b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III-a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III-b	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	IV-a	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IV-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	

**Sumber : Data Kepegawaian Tahun 2023**

Jumlah pejabat struktural /eselon berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari Eselon II, 1 (satu) orang pendidikan S1, Eselon III-b, 1 (satu) orang pendidikan S1, Eselon III-b, 3 (tiga) Orang pendidikan S1, Eselon IV-a , 11 (sebelas) orang pendidikan S1 total Pejabat Struktural 7 (Tujuh ) orang.

Gambar 1.2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



#### ❖ Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Hingga akhir Tahun 2023 yang menjabat secara definitive hanya 6 (Enam) orang yaitu, 1 Kepala Dinas, Sekretaris, 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dengan klasifikasi Data Pegawai Negeri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memengang jabatan struktural menurut Jenjang Eselon sebagai berikut:

- Eselon II , berjumlah 1 (satu) Orang;
- Eselon IIIa, berjumlah 1 (satu) orang;
- Eselon IIIb, berjumlah 3 (tiga) orang;
- Eselon IV, berjumlah 2 (dua) orang.

#### ❖ INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah:

- Dukcapil masuk Desa, adalah pelayanan pembuatan dokumen kependudukan secara daring langsung ke kantor desa seperti pelayanan di kantor dinas;



- Program Bela Sungkawa Serah Akta Kematian ( BEL SAKIT) yang pada kegiatan ini bertujuan untuk ;
  - Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan akta kematian;
  - Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat;
  - Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta Kematian.
- JAM KRAMAT (Jelas alamat Ke rumah Akta kematian) adalah kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi
- Serah terima religi (Rekap langsung jadi Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA, yang menyebabkan antusiasme masyarakat/orang tua dalam pengurusan KIA sehingga diharapkan setiap anak di Kabupaten Luwu Timur memiliki KIA.
- Balada ( Bayi Lahir langsung dapat Akta Kelahiran Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) bertujuan untuk percepatan kepemilikan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak bagi Bayi lahir dan juga mendukung terbentuknya database kependudukan yang akurat.



### C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat

## 6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2021-2026 Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil menjalankan Misi ke -4 yaitu : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan tugas-tugas yang meliputi :

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
2. Mengkoordinasikan an menyelenggarakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta informasi administrasi kependudukan;
4. Merencanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, sub kegiatan , keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Dinas

## **D. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi Penjelasan umum tentang latar belakang, struktur organisasi, fungsi dan tugas, cascading, isu strategis, keadaan pegawai, keuangan, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penyusunan LAKIP.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas. Disamping itu juga disajikan kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

#### **LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48).

Dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut Tujuan yaitu **“Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas”** dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Admuduk

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Akhir Priode Renstra Tahun 2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2026
<b>Tujuan 1.</b> Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Pelayanan NonSPM	85,00( Nilai)
<b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00 (Nilai)
<b>Sasaran 2.</b> Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	91,70 %
<b>Tujuan 2.</b> Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai SAKIP hasil evaluasi Internal Inspektorat	75 %
<b>Sasaran 1.</b> Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase capaian kinerja program Penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %

## B. Prioritas Nasional Tahun 2023

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, Bappenas menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran

dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

- a. PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- b. PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; dan
- c. PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), dan di antara 7 (tujuh) PN tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri diberikan peran pencapaian output dalam menyukseskan 1 (PN), yaitu:

PN 7: Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (polhukhankam), dan transformasi pelayanan publik

Program Nasional dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan	Pengelolaan kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik</li> <li>b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta</li> </ol>	99,4%

Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota Luwu Timur	Kelahiran usia 0 -18 Tahun	98%
	c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	
	d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	50%
	e. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data	
	f. Integrasi pemanfaatan Data dan dokumen Kependudukan dengan OPD	3 Mitra
	g. Buku Pokok Pemakaman (BPP)	15 (lima belas) OPD dan atau badan Hukum Indonesia
		15 (lima belas) OPD dan atau badan Hukum Indonesia
	h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	
	i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	75% desa /Kelurahan nama lain memiliki BPP
	j. Kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	75% pemakaman Umum/Pemakaman keluarga yang ada

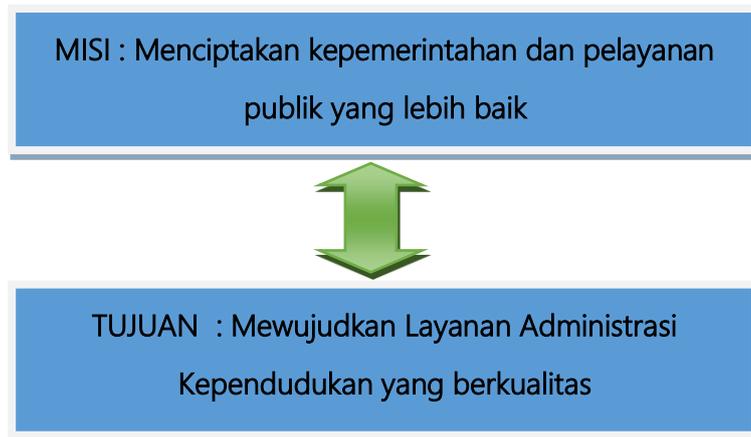
		k. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan Adminduk	petugasnya memiliki BPP  25 % dari Total Perekaman di Daerah  Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT  Tidak ada pelanggaran  Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan Adminduk
2	Capaian Keluaran /Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran Output hasil Pelayanan Dokumen lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2

			(dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat
3	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan Piak serta pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) Inovasi (1 Tahun 2 Inovasi)
4	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah)	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)
5	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota
6	Penugasan kepada desa atau disebut dengan nama lain untuk membantuy penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat Desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa

7	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penganangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota
---	--------------------------------	--	--

### C. TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:



Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	IKM Non SPM	%	84,00	85,00

<b>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>Nilai</b>	<b>71,30</b>	<b>75,00</b>
---	--	--------------	--------------	--------------

#### D. SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel C25 di renstra

**TUJUAN** : Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas

#### SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
3. **Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil**

**Tabel 2.3**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	n.a	80,90
Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	%	89,70	91,39
Meningkatnya kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian kinerja program Bidang Urusan Penunjang dinas kependudukan dan pencatatan sipil	%	95,00	100

## E. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PROPIL KEPENDUDUKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

## F. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

### 2.5. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,70
2	Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	2	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	90,61
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	3	Persentase capaian rata-rata kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 ini.

## G Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 8) tanggal 16 Oktober 2023 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 78 Tahun 2023 tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor 78) tanggal 16 Oktober 2023, Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami penambahan sebesar Rp. 556,986.100,- Dimana

anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 5.886,971,750,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.443.957.850,-

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah RKA tahun 2023, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 4.927,239,515-
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.738.463,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.269,930,470-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 16.386.095,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 91.818.100,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.093.437.250,-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 720,139,137,-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 546.240.000,-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 141.550.000,-
<b>B</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Rp. 458.784.800,-</b>
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 458.784.800,-
<b>C</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Rp. 503.501.635,-</b>
10	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 435.231.635,-
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Rp. 68.270.000,-

<b>D</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi</b>	<b>Rp.119.955.000,-</b>
13	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp. 61.000.000,-
14	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.58.955.000,-
<b>E</b>	<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>Rp. 434.476.900,-</b>
15	Penyusunan Profil Kependudukan	Rp. 434.476.900,-
<b>PAGU</b>		<b>6.443.957.850,-</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

#### I. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil merupakan Kinerja Tahun ke 3 pada priode Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil 2021-2026, secara rata-rata capaian kinerja sebesar 100,85% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran atas Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis 1.					
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan					
NO	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		80,70	81,33	100,78
Sasaran Strategis 2.					
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					
1	Persentase Administrasi Kependudukan	Cakupan	90,61	92,16	101,70
Sasaran 3.					
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil					
1	Persentase capaian rata-rata kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100	100	100

Keterangan: Realisasi Menggunakan Realisasi Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada table di atas dapat diketahui :

- I. Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 2 target;
- II. Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 target.

## II. Analisis Capaian Kinerja

### a) Sasaran Strategis I Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Capaian indikator indikator sasaran “ Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	80,70	81,33	100,78

#### ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat

Maksud Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang melaksanakan survei.

Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya pemohon layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 2) Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat;



- 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
- 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Unsur-unsur dalam kuesioner untuk mengetahui kepuasan masyarakat meliputi sembilan unsur pelayanan dengan mengadopsi Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, yaitu:

a. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik teknis maupun administratif.

b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara layanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.

c. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.

d. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang diberikan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

e. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Produk spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan inimerupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

g. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan pengaduan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Kuisisioner diberikan kepada pelaku pemohon penerbitan Dokumen Kependudukan. Hasil dari kuisisioner tersebut kemudian dikumpulkan untuk diolah sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil olahan data akan menghasilkan nilai yang dituangkan kedalam laporan dan dikategorikan dalam keterangan mutu pelayanan:

Tabel 3.3. Keterangan Rentang Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai	Keterangan	Rentang Nilai
<b>A</b>	Sangat Baik	88,31-100
<b>B</b>	Baik	76.61-88.30
<b>C</b>	Kurang Baik	65.00-76.60
<b>D</b>	Tidak Baik	25.00-64.99

#### ❖ METODE PENGOLAHAN DATA

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan. Dalam hitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan. Dalam perhitungan kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki pertimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{N} = N$$

$$\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM Unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

#### **SKM Unit Pelayanan x 25**

Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berserta perbandingannya dengan hasil penilaian tahun sebelumnya Digambar pada table dibawah ini:

Komponen	IKM 2022	IKM 2023	Naik/Turun
<b>Sarana dan Prasarana</b>	3,12	2,92	-0,2
<b>Penanganan Pengaduan</b>	3,12	3,44	0,32
<b>Prilaku Pelaksana</b>	3,08	3,40	0,32
<b>Kompetensi Layanan</b>	3,24	3,36	0,12
<b>Produk spesifikasi Layanan</b>	3,00	3,20	0,2
<b>Biaya/Tarif</b>	4,00	3,60	-0,4
<b>Waktu Penyelesaian</b>	3,08	3,08	0
<b>Sistem mekanisme dan Prosedur</b>	3,16	3,00	-0,16
<b>Persyaratan</b>	3,36	3,28	-0,08
<b>Total</b>	3,240	3,253	0,013

Berdasarkan data diatas, nilai komponen IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan. Akan tetapi terdapat empat komponen penilaian IKM yang menurun yaitu komponen persyaratan, system mekanisme dan prosedur, biaya, dan sarana dan prasarana.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada beberapa stakeholders jika terdapat perubahan pada kebijakan dalam penyelenggaraan penerbitan administrasi Kependudukan dan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap masalah masalah yang ada pada layanan administrasi kependudukan.

Perbandingan realisasi IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dengan Realisasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 s.d 2023**

Realisasi 2022	Realisasi 2023
81,00	81,33

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- a. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan penerbitan administrasi kependudukan; dan
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan hospitality bagi seluruh pegawai.

3.5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Lalu (2022) %	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100,50	80,70	81,33	100,78	81,00	100,78

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah Dimana target jangka menengah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 81,00 dan realisasi tahun ini dengan nilai 81,33 dengan capaian 100,40% ini disebabkan meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target :

**b)** Adanya Inovasi yang dilakukan pada tahun 2023 diantaranya :

- Program Bela sungkawa Serah Akta Kematian (Bel Sakit) yang berujuan untuk :
  - a) Memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam pengurusan Akta Kematian
  - b) Memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Masyarakat;

c) Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan Masyarakat dalam percepatan kepemilikan akta kematian.

- Program Jam Kramat (Jelas Alamat ke rumah akta kematian) Kegiatan pelayanan langsung ke rumah warga dalam hal penerbitan akta kematian, baik yang terlapor maupun yang teradvokasi
- Serah terima religi ( Rekap langsung jadi kartu Identitas Anak) bertujuan untuk mempermudah Masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang persyaratan pembuatan KIA.
- Balada (bayi lahir langsung dapat akta kelahiran kartu keluarga dan kartu identitas anak) yang bertujuan ntuk percepatan kepemilikan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak bagi bayi lahir .
- Kebijakan regulasi dari Kementerian terkait percepatan dalam hal administrasi kependudukan.

Faktor penyebab kegagalan pencapain target :

- a) Belum tertibnya penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan jika terjadi perubahan data dalam keluarga
- b) Sarana dan prasarana dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan masih belum optimal

❖ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran satu (1) yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebesar Rp. 962.286.435,- atau 14,93% dengan realisasi Rp. 945.809,774 dengan capaian 98,29% dibandingkan dengan capaian kinerja 100,78% **berarti tingkat efisiensi sebesar 2,49 %**

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama sasaran Ke Satu terdiri dari 2 (dua) Program dan 3 (tiga) Kegiatan :

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan Indikator Kinerja Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan target 99,85% realisasi 98,21% atau dengan capaian 98,36 % tidak mencapai target disebabkan Meningkatnya jumlah Wajib KTP yang meningkat pada semester II Tahun 2023 dimana pada semester I wajib KTP Berjumlah 215.619 jiwa pada semester II menjadi 221,011 Jiwa disebabkan banyaknya penduduk yang pindah datang ke Luwu Timur

2. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan dua Indikator yaitu :
  - a) Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan indikator kinerja Persentase penerbitan Kartu Keluarga merupakan angka perbandingan antara Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga dan Jumlah Kepala Keluarga dan pada tahun 2023 semester I semenjak Aplikasi SIAK Terpusat di terapkan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat dari target 98,60 persen menjadi 99,85 Persen
  - b) Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dengan indicator Kinerja Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah angka perbandingan Jumlah kepemilikan kartu identitas anak dibagi Jumlah Wajib KIA dengan target 50 % realisasi 54,06%
3. Program Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Cakupan penerbitan Akta kelahiran target 97,05 realisasi 99,03 Persen yaitu perbandingan antara Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun 2023 sebanyak 3.658 Jiwa dan Jumlah kelahiran ditahun 2023 sebanyak 3.694 dikali 99,03%
4. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator kinerja Kepemilikan Akte kelahiran usia 0-17 tahun yaitu perbandingan jumlah
  - a) kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun sebanyak 98,089 Jiwa dan penduduk umur 0-17 tahun sebanyak 100.607 Jiwa
  - b) Kepemilikan Akta Kematian 100 % yaitu Jumlah kepemilikan Akta kematian berjumlah 1.603 dan jumlah kematian yang dilaporkan 1.603
  - c) Kepemilikan akta perceraian 100 persen adalah perbandingan Jumlah kepemilikan Akta perceraian berjumlah 15 pasangan dibagi dengan Jumlah pasangan cerai yang dilaporkan 15 pasangan
  - d) Kepemilikan Akta Perkawinan adalah Perbandingan jumlah penduduk yang memiliki buku perkawinan 76,265 dibagi Jumlah Penduduk yang melaporkan perkawinannya  $139,785 \times 100 = 54,56\%$
5. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil adalah Jumlah Mou dengan organisasi Kemasyarakatan dibagi Jumlah MOU dengan organisasi kemasyarakatan yang direncanakan x100 target 1 MOU realisasi 1 MOU yaitu MOU dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur.

**b) Sasaran Strategis 2 Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk**

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.6. *Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan</b>	90,61	92,16	101,70

Keterangan : *Realisasi merupakan data kependudukan semester II tahun 2023*

**Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan**

Persentase Cakupan dokumen Kependudukan adalah cara untuk mengukur kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang terdiri dari :

1. Persentase Cakupan penerbitan Kartu Keluarga
2. Persentase Cakupan penerbitan KTP-el
3. Persentase Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah
5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai Non Muslim

Perbandingan realisasi nilai Persentase cakupan Dokumen kependudukan Tahun 2021, 2022 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel.3.7.Perbandingan Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan Tahun 2021,2022 s.d 2023**

Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
<b>97,17</b>	<b>91,28</b>	<b>92,16</b>

Dari Data diatas dapat dilihat adanya peningkatan setiap tahunnya ini menandakan meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya mengurus dokumen kependudukan dan juga dari inovasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal Kerjasama dalam layanan penerbitan dokumen pencatatan sipil.

3.8. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Realisasi	Capaian %
Persentase cakupan dokumen Administrasi kependudukan	%	91.70	92,16	100.50%

Pada data diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian Dimana target jangka menengah yaitu 91,70 % realisasi 92,16 % atau dengan capaian 100.50% disebabkan oleh disebabkan adanya dukungan dari pihak –pihak terkait seperti Lembaga , organisasi ke masyarakatan dan OPD pengguna data kependudukan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional

**Tabel 3.9**

**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD, tingkat Provinsi dan Nasional**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target			
		2023	RPJMD	Provinsi	Nasional
1	Persentase Cakupan Dokumen Pelayanan Kependudukan	91,70 %	92,00	-	-

Pada tabel diatas memperlihatkan capaian realisasi kinerja Tahun 2023 dari target 91,70 Persen terealisasi menjadi 92,16 persen dan di sandingkan dengan Target RPJMD sebesar 92,00 % dengan melihat pencapaian di Tahun 2023 target RPJMD telah tercapai dan melebihi dari target RPJMD;

Untuk Perbandingan Target Provinsi dan Nasional tidak ada indikator yang sama sehingga tidak dapat dianalisis.

❖ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

**a. Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target**

- Adanya Kerjasama pemanfaatan data Kependudukan dan kerjasama layanan penerbitan dokumen kependudukan pada organisasi dan Lembaga pengguna lainnya.
- Tersampainya informasi terkait regulasi dan kebijakan baru kepada Masyarakat;

**b) Faktor penyebab kegagalan pencapaian target**

- Adanya perubahan alur terkait prosedur alur perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan, perubahan permendagri 102 tahun 2019 menjadi permendagri 17 Tahun 2023 mengakibatkan adanya perubahan alur dalam Perjanjian Kerjasama.

**❖ Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama yang Kedua yaitu :

1. Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dimana indikator kinerja Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Indikator Cakupan Pengelolaan Informasi Kependudukan yang terinterasi adalah Jumlah OPD/Lembaga yang mendapatkan Akses ( 5 OPD / Jumlah OPD/Lembaga yang bermohon untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan 4 x 100% 1.PTSP 2. RS Laga Ligo 3. Bapenda 4. Kominfo
2. Kegiatan Pengumpulan Data kependudukan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Persentase OPD/Lembaga yang telah memanfaatkan data dan layanan kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama, OPD Yang memanfaatkan data kependudukan ada 12 OPD x target 20 OPD yang direncanakan \*100 = 60%
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pencatatan Sipil target 100 % realisasi 100 %
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Cakupan data kependudukan yang disediakan Jumlah dokumen data kependudukan yang disusun (3 Dokumen) / jumlah dokumen data kependudukan yang direncanakan (3 Dokumen) x 100% capaian 100%
5. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Profil Kependudukan responsif Gender yang disusun 1 Buku Profil

Kependudukan x dibagi Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang direncanakan (1 Dokumen)x 100 capaian 100%

❖ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran dua yaitu **Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Adminduk** Sebesar Rp. 554.431.900,- atau 8,60% dengan realisasi Rp. 550.485,617 dengan capaian 99,29 % dibandingkan dengan capaian kinerja 102.22% **berarti tingkat efisiensi sebesar 2,93 %**

KET :

Capaian kinerja :  $\text{raalisasi indikator} / \text{target} \times 100\%$

Penyerapan anggaran :  $\text{realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator}$ .

Tingkat efisiensi :  $\text{capaian kinerja} - \text{pemyerapan anggaran}$

**c) Sasaran Strategis III (Tiga) Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil**

A. Capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

Tabel.3.10.

Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator	satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase capaian kinerja program penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100

Keterangan : Mencapai target

Dengan formulasi  $\text{Realisasi capaian program} / \text{Target capain program yang di rencanakan} \times 100\%$

Target Indikator sasaran penunjang Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Persentase capaian

mencapai target yang ditetapkan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel.3.12.**

**Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi tahun 2023
Persentase capaian kinerja program penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100	100	100

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan pada tahun sebelumnya pada indicator sasaran strategis 3 (tiga) yaitu persentase capaian kinerja program penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Dimana realisasi setiap tahun dapat mencapai target hal ini didukung oleh SDM yang memadai dan manajemen administrasi yang tertib, sehingga kegiatan yang menunjang administrasi dapat mencapai target sesuai yang direncanakan.

**Tabel 3.12.Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Perbandingan Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD	Realisasi tahun 2023	Capaian %
Persentase capaian kinerja program penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	100%

Pada data diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian Dimana target jangka menengah yaitu 100 % realisasi 100 % atau dengan capaian 100% dapat dilihat

perbandingan dengan priode target jangka menengah untuk indicator persentase capaian kinerja program penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil akan tetap mencapai 100 % sesuai dengan target akhir RPJMD hal ini didukung dengan manajemen administrasi yang tertib.

❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan menyerap anggaran sebesar 98,27%. Capaian kinerja program mencapai target sesuai yang direncanakan

capaiannya kinerjanya 100%, Program didukung oleh 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun s.d Triwulan IV TA. 2023 sebanyak 16 dokumen dan terealisasi 16 dokumen (100%) yaitu Dokumen DPA-SKPD TA. 2023, DPPA-SKPD TA. 2023, LAPKIN Tahun 2022, LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022, Renja 2024, Renja Perubahan 2023, RKA-P TA. 2023, RKA TA. 2024 dan Laporan Evaluasi RKPD TW I, II, & III TA. 2023, Laporan Evaluasi Kinerja TW I, II & III TA. 2023.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan

Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja yang sesuai target.

3. Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100%
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan bimtek/pelatihan yang disesuaikan dengan surat undangan/pemanggilan peserta;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target TA. 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja kurang dari target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan capaian 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.

Target TA. 2023 sebesar 100% dan realisasi 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ndikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ndikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus. Target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%.

#### ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Terdapat jabatan fungsional penyeteraan yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- c. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
- d. Keterlambatan proses administrasi keuangan

#### ❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-

langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
- b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan

## ❖ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi tahun 2023	Capaian n%	Alokasi Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran 2023	Capaian n%
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	4.927.239.515	4.841.989.653	98,26

Anggaran yang mendukung tercapainya pencapaian kinerja sasaran tiga yaitu Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian kinerja penyelenggaraan Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Sebesar Rp. 4.927.239.515 atau 76,46 dengan realisasi Rp. 4.841.989.653,- dengan capaian 98,26 % dibandingkan dengan capaian kinerja 100% **berarti tingkat efisiensi sebesar 1,74 %**

## ❖ Capaian Kinerja Lainnya

Gambar 3.1. Pencapaian Target Nasional semester II Tahun 2023

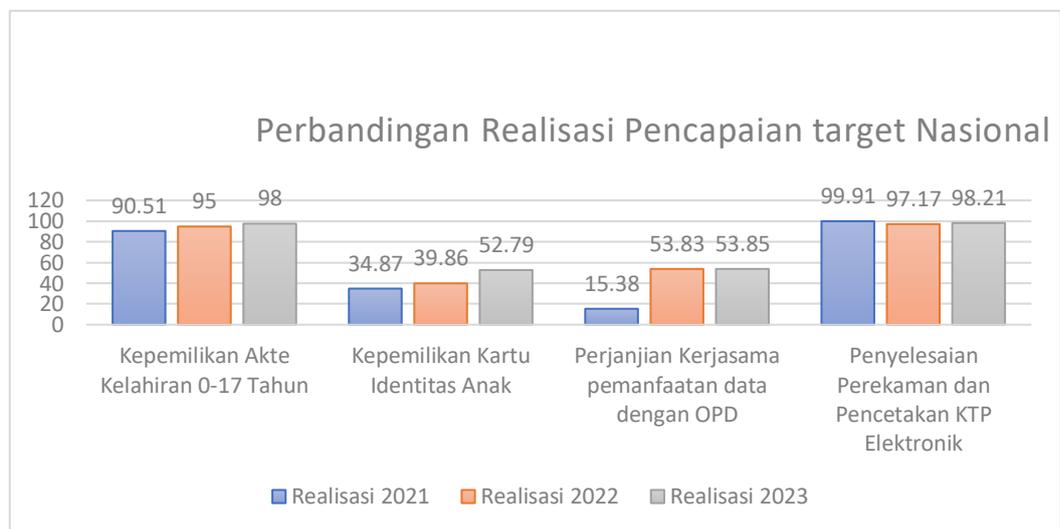


Pencapaian Kinerja Pada Program Nasional dari Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari :

1. Kepemilikan akte kelahiran 0-17 tahun target 98 % realisasi 98 %
2. Kepemilikan kartu identitas Anak target 50 % realisasi 52,79 %;
3. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data dengan OPD target 15 OPD realisasi 12 OPD capaian 80%;
4. Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik target 99,4 % realisasi 98,21 % adanya penurunan disebabkan tingginya wajib KTP pada semester II disebabkan adanya pindah datang penduduk wajib KTP ( Pemula).

❖ **Analisis Perbandingan Realisasi Target Nasional dengan Tahun Sebelumnya**

**Gambar 3.2. Perbandingan Realisasi Target Nasional Tahun 2021, 2022 dan 2023**



Pada Gambar diatas dapat dilihat dari 4 (empat) realisasi indikator target nasional ada 3 (tiga) indicator yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan ada satu indikator yang mengalami penurunan disebabkan banyaknya wajib KTP elektronik bagi pemula yang meningkat setiap tahun

**B. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN**

Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja sebesar Rp. 6.443.957.850,- dengan realisasi anggaran untuk Tahun 2023 sebesar Rp. **6.338.285.044,-** dengan capaian 98,36 % ( Sangat Tinggi) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian %
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>Rp.6.443.957.850</b>	<b>Rp. 6.338.285.044</b>	98,36
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp. 5.723.818.713</b>	<b>Rp. 5.651.394.044</b>	<b>98,73</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 2.293.230,470	Rp. 2.245.803.292	97,93
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.3.430,588,243	Rp.3.405.590.752	99,27
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp. 720,139,137</b>	<b>Rp. 686.891.000</b>	<b>95,38</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 697.639.137	Rp. 664.691,000	95,28
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 22.500.000,-	Rp. 22.200.000	98,67

No	Program	Anggaran	Realisasi	capaian	Sisa Anggaran	%	Penanggung Jawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	4.927,239,515	4,841,989,653	98,27	85,249,862	1,73	Sekretariat
2	Program Pendaftaran Penduduk	458,784,800	448,043,334	97,66	10,741.466	2,34	Bidang pendaftaran penduduk
3	Program Pencatatan Sipil	503,501,635	497,766,440	98,86	5,735,195	1,14	Bidang Pencatatan Sipil
4	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.955.000	119.440.000	99,57	515.000	0,43	Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	434.476.900	431.045.617	99,21	3.431.283	0,79	Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan data
	<b>Total</b>	<b>6,443,957,850</b>	<b>6,338,285,044</b>	<b>98,36</b>	<b>105.675.806</b>	<b>1,64</b>	

❖ **Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN</b>			
2	<i>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Target 2 Dokumen : Renja P 2023, Pokok 2024	capaian keuangan 98,99 masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 111,600,- dari hasil sisa Nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Jumlah dokumen RKA-PD yang disusun target 2 Dokumen : RKA Perubahan dan Pokok 2024	capaian keuangan 91,17 masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 674.063,- dari hasil sisa Nego dari transaksi	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Target 2 Dokumen : DPA Pokok 2023 dan DPA Perubahan 2023	capaian keuangan 91,32 masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 220.000,- dari hasil Nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.2.01	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan perangkat daerah yang disusun Target 10 Dokumen : LAKIP 2022, Laporan LKJ Triwulan I, II, III, dan IV, 2023 Rencana aksi Tahun 2023 laporan evaluasi terhadap rencana aksi triwulan I, II, III dan IV tahun 2023	capaian keuangan 97,84 masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 572.500,- dari hasil Nego rp. 77,500 dan dari belanja sisa dari perjalanan dinas luar daerah Rp.495.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayarkan target 18 Orang Realisasi 18 Orang capaian 100%	capaian keuangan 98,94 masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 23.822.178,- dari sisa Accres Gaji Rp. 17.145.739,- dan Rp.6.676.439,- dari potongan Absen pada Tambahan	

			penghasilan berdasarkan beban kerja	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah dokumen laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun target 14 Dokumen Realisasi 14 Dokumen Laporan pengeluaran Keuangan dari bendahara 12 Laporan, Laporan Rekon 2 semester	capaian keuangan 98,73,- masih ada sisa anggaran dari belanja bahan cetak sebesar Rp. 305.000,- dari hasil sisa Nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu target 4 dokumen realisasi 4 Dokumen yaitu laporan Persediaan triwulan I, II, III dan IV tahun 2023	capaian keuangan 98,14 Sisa Uang Rp 305,095,- masih ada sisa anggaran dari belanja ATK sebesar Rp. 47,095,- bahan kertas dan cover sebesar Rp. 28.000 dan belanja bahan cetak Rp. 60.000,- dari hasil sisa Nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
2.12.01.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian target 4 dokumen realisasi 4 dokumen : KGB, Kenaikan Pangkat santya Lencana ,SKP	capaian keuangan 77,77,- masih ada sisa anggaran dari belanja bahan kertas dan cover sebesar Rp. 1.438.400 dan belanja bahan cetak Rp. 380.000,- dari hasil sisa Nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan target 6 orang realisasi 6 orang	capaian keuangan 94,45,- masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 4.640.750 dari dan belanja bahan Kontribusi Rp. 4.600.000,- dan Belanja perjalanan Dinas Rp. 40,750 disebabkan belanja ini sifatnya disediakan	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya

<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
<b>2.12.01.2.06.01</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Jenis listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Target 2 Jenis Realisasi 2 Jenis Baterai dan Stop Kontak	Capaian keuangan 100%	
<b>2.12.01.2.06.04</b>	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah bahan Logistik kantor yang disediakan Target 4 Jenis Realisasi 4 Jenis Sabun cuci piring, BBM Mesin babat rumput, Super pel, keset dan tempat sampah	Capaian keuangan 100%	
<b>2.12.01.2.06.02</b>	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan Target 4 Jenis Realisasi 4 Jenis : fargo Film KTP,, Tinta Ribbon KTP, Tinta Ribbon KIA dan Blangko KIA	Capaian keuangan 99, 74 % Sisa Anggaran 190.500 dari sisa hasil nego	<b>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya</b>
<b>2.12.01.2.06.05</b>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan atau penggandaan yang diadakan Target 2Jenis Realisasi 2 Jenis yaitu Penggandaan Laporan serta Peraturan Perundang undangan dan Cetak Spanduk	Capaian Keuangan 99,63 % sisa Anggaran 45.000,- dari hasil sisa Nego	<b>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya</b>
<b>2.12.01.2.06.06</b>	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan Target 84 Eksamplar Realisasi 84 Eksamplar Lokal 3 regional 1 dan 1 Nasional	Capaian keuangan 99,06 sisa anggaran 80,000 sisa dari belanja Koran	<b>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya</b>
<b>2.12.01.2.06.08</b>	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Target 1 Laporan Realisasi 1 Laporan	Capaian Keuangan 75, 51 % sisa anggaran 1,970.000 merupakan sisa dari Nego dimana harga satuan yang di siapkan untuk prasmanan 35.000 pada saat transaksi di ekatalog harga tersebut tidak tersedia hanya tersedia pada rekanan harga 25.000,	<b>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya</b>
<b>2.12.01.2.06.09</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan Target 58 laporan Realisasi 58 Laporan : sebanyak 58 Laporan rapat koordinasi luar dan dalam daerah yang diselenggarakan	Capaian Keuangan Rp. 99,88 % sisa anggaran 589.331 dari sisa anggaran perjalanan dinas	<b>Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya</b>

<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
<b>2.12.01.2.07.01</b>	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan target 1 unit realisasi 1 Unit : Kijang Innova Zenix	capaian Keuanga 94,76 % sisa anggaran 26.700.000 merupakan sisa dari hasil nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
<b>2.12.01.2.07.05</b>	<i>Pengadaan mebel</i>	Jumlah mebel yang diadakan Target 11 Unit Realisasi 11 Unit yaitu 9 Unit Kursi Kerja Eselon IV dan 2 Meja Staf	Capaian Keuangan 95,67 sisa anggaran 910.000 dari sisa hasil nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
<b>2.12.01.2.07.06</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan target 17 Unit realisasi 17 Unit :1. AC 1 PK, 6 Unit 2. Camera, 1 Unit 3. Finger Print KTP 1 Unit 4. Scanner 1 (unit) 5.Printer 5 Unit laptop 1 Unit , PC 2 Unit	Capaian Keuangan 96,80 % sisa Anggaran Rp. 5.338.137,- dari sisa hasil nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
<b>2.12.01.2.07.07</b>	Belanja Modal Bangunan dan bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan gedung Kantor dan Bangunan lainnya target 1 Unit Realisasi 1 unit : DED Penambahan Ruang Pelayanan	Capaian Keuangan 98,67 % sisa anggaran Rp. 300.000 dari sisa hasil nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
<b>2.12.01.2.07.06</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>2.12.01.2.08</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan Target 600 Lembar realisasi 600 Lembar		
<b>2.12.01.2.08.01</b>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah rekening internet,TV,Listrik dan Air yang terbayarkan target 3 Rekening realisasi 3 Rekening : Rekening listrik, Rekening Air dan Rekening Internet	capaian keuangan 94,22 % masih ada sisa anggaran 11,675.056 sisa dari belanja air Rp. 27.700,- Belanja Listrik 10.096.618,- dan belanja internet Rp. 918.738,- belanja ini sifatnya disediakan	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
<b>2.12.01.2.08.02</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan target 5 Orang jumlah pelayanan penerbitan administrasi kependudukan 6 Kali	Capaian Keuangan 99,82 % sisa anggaran Rp. 632.000,- sisa dari Belanja BBM Rp. 272.000 belanja ini sifatnya disediakan, sisa anggaran belanja perjalanan dinas Rp. 360.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya

2.12.01.2.08.04	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>			
2.1201.2.09.01	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan darat bermotor-kendaraan Dinas Bermotor-perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara Target 5 Unit Realisasi 5 Unit	Capaian Keuangan 91,90 % sisa Anggaran Rp 4.125.252 dimana belanja ini sifatnya disediakan	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
5.1.02.03.02.0035	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang dipelihara (unit) Target 83 Unit Realisasi 83 Unit	Capaian Keuangan 99,93 % Sisa Anggaran Rp.40.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
5.1.02.03.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Target 1 Unit Realisasi 1 Unit	Capaian Keuangan 97,28 % Sisa Anggaran Rp.817.000,-dimana belanja ini sifatnya disediakan	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.01.2.09.09	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>			
2.12.02	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>			
2.12.02.02.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pendaftaran Penduduk target 3 Dokumen Realisasi 3 Dokumen 1. Laporan Realisasi Pelayanan Kartu Keluarga sampai dengan Desember berjumlah 31,649 Lembar 2. Laporan Realisasi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sampai Desember 2023 berjumlah 24,975 Keping 3. Laporan print Kia sampai Desember Berjumlah 16.432 Keping	capaian keuangan sebesar 97,10 % dengan sisa anggaran Rp. 9.828.000 yang terdiri dari belanja BBM Rp 470.000,- Anggaran ini tidak terpakai disebabkan dialihkan ke kegiatan lain, Belanja jasa pelayanan umum tersisa anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- disebabkan karena adanya 3 upah jasa yang diterima sebagai PPPK, belanja sisa perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 358.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.02.02.01.02	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, target 3 Laporan Kegiatan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk merupakan kegiatan pelayanan kepada penduduk rentan seperti ODGJ, Lansia, Disabilitas dan rentan admiduk dan rentan lainnya seperti masyarakat yang terkena bencana.	Capaian keuangan sebesar Rp. 98,87 % dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 847.000,- merupakan sisa dari belanja alat tulis kantor Rp. 25.200,- sisa Anggaran belanja Kertas dan cover sebesar Rp. 405.000,- Sisa anggaran dari belanja cetak dan penggandaan	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya

			sebesar Rp. 21.600,- sisa anggaran dari belanja bahankomputer sebesar Rp. 360.000,- yang merupakan sisa dari hasil nego dan sisa anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.360.000,-	
2.12.02.02.01.04	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen Jumlah Penduduk yang pindah per SKP WNI berjumlah 7.763 Jiwa	Capaian keuangan sebesar Rp. 99,85 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- merupakan sisa dari belanja perjalanan dinas	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>			
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting target 3 Dokumen realisasi 3 Dokumen 1. Laporan cetak Akta Kelahiran sampai dengan Desember berjumlah 9.700 Lembar 2. Laporan Cetak Akta Kematian berjumlah 1.603 Lembar 4. Laporan Cetak akta cerai berjumlah 51 Lembar 3. Laporan Cetak akta Perkawinan Non Muslim berjumlah 523 lembar	Capaian Keuangan sebesar 98,98 % disebabkan adanya sisa anggaran sebesar Rp.2.794.400,- dari belanja bbm yang tidak dipakai disebabkan dialihkan ke BBM kegiatan lain dan sisa dari Belanja cetak rp. 150.000,- yang merupakan hasil nego dan sisa dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 180.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan pelayanan pencatatan sipil dan pendistribusian dokumen, akta kelahiran,kematian, perkawinan dan perceraian secara Mobile (Kegiatan) target 4 layanan Kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil berupa pendistribusian 1. Akta kelahiran 2. Akta Kematian, Akta Nikah Non muslim 4. Akta cerai Non Muslim	Capaian Keuangan sebesar Rp,98. 78 % sisa anggaran sebesar Rp. 1.968.195,- yang merupakan sisa dari hasil nego dan sisa dari belanja perjalanan dinas	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

2.12.03.2.02.09	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	Jumlah Dokumen Kerjasama dengan Organisasi ke Masyarakat dan perguruan tinggi target 1 MOU realisasi 1 MOU MOU dengan Organisasi Masyarakat (PKS dengan Tim Penggerak PKK)	Capaian Keuangan 98,58 % sisa anggaran sebesar Rp. 972.000,- yang merupakan hasil dari sisa nego	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			
2.12.04	Kegiatan pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data dan penyajian data base kependudukan			
2.12.04.2.01	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan target 5 PKS, realisasi 4 PKS Kominfo, Bapenda, RS Laga Ligo dan PTSP	Capaian keuangan sebesar Rp. 99,89 % terdapat sisa anggaran dari hasil Nego sebesar Rp.75.000,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.04.2.01.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan			
2.12.04.2.3	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen Laporan Sosialisasi IKD	Capaian keuangan sebesar Rp. 99,25 % terdapat sisa anggaran dari hasil Nego sebesar Rp.55.000,- dan sisa anggaran dari perjalanan dinas Luar daerah Sebesar Rp. 385.250,-	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya
2.12.04.02.03.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROPIL KEPENDUDUKAN</b>			
2.12.05	<b>Penyusunan Propil Kependudukan</b>			
2.12.05.2.01	Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kependudukan yang disusun target 3 Dokumen realisasi 3 Dokumen Laporan Kependudukan yang disusun 3 Dokumen terdiri dari 1. Data Kependudukan semester 2 2022, 2. Buku Profil Kependudukan Tahun 2022 dan Buku Data Semester 1Tahun 2023	capaian keuangan sebesar Rp. 99.21 % terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar Rp. 3.431.283,- dari sisa anggaran hasil nego belanja ATK, 385.250, belanja kertas dan cover Rp. 1.370.050, belanja cetak Rp. 500.000,- dan belanja bahan komputer sebesar Rp. 931.000,- dan sisa perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 244.983	Agar PPTK mencermati sisa anggaran yang tidak realisasi untuk menjadi bahan evaluasi pada tahun berikutnya

### C. Rekomendasi tindaklanjut

No	Rekomendasi	Rencana aksi Tindakanlanjut	Status/Progres penyelesaian
1.	Membuat target Kinerja yang lebih menantang namun diyakini dapat dicapai	Belum memenuhi target yang dianggap menantang disebabkan adanya data kependudukan yang berfluktuasi	Akan melakukan koordinasi dengan bidang terkait target kinerja
2	Dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu	Akan melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu	Telah melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu tanggal 27 Februari 2024
3	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian / pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, namun hal ini perlu pembahasan Bersama dengan dinas terkait dalam hal dasar hukum	Belum ada pembahasan Bersama dengan dinas terkait dalam hal dasar hukum	Telah di koordinasikan dengan Aparatur lingkup disdukcapil dan menunggu dasar hukum untuk menindaklanjuti
4	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.	Telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan penempatan structural dan fungsional	Telah dilakukan pengukuran kinerja dalam Evaluasi Internal setiap Triwulan
5	Pengukuran kinerja dijadikan dasar untuk mengusulkan penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	Akan dilakukan pengukuran dalam pengusulan refocusing organisasi	Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pengukuran kinerja untuk dasar mengusulkan penyesuaian refocusing organisasi
6	Agar Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) tidak digambarkan secara umum.	Akan melakukan atau menginfokan perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam penyempurnaan kinerja ke depan	Telah menginfokan Upaya perbaikan kinerja pada Hal 47 di bagian rekomendasi dan tindak lanjut
7	Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab seluruh pegawai dan meningkatkan budaya kinerja organisasi.	Akan menginformasikan yang menjadi tanggung jawab pegawai dalam rangka meningkatkan budaya kinerja organisasi	Melakukan pelaporan kinerja setiap triwulan sesuai tugas pokok dan fungsi pegawai
8	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Akan melakukan kinerja internal dengan menggunakan teknologi yang ada	Evaluasi kinerja internal menggunakan spreed sheet
9	Agar ditindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal baik evaluasi berjenjang maupun rekomendasi Inspektorat.	akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi kinerja internal dan rekomendasi inspektorat	Disajikan pada evaluasi Internal setiap triwulan dan Laporan LAKIP
10	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Telah menindaklanjuti hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Disajikan pada laporan kinerja Internal

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan perkembangan tahun tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara Umum Capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dinyatakan mencapai Target (berkinerja dengan **Baik**), dari 3 (tiga) Target Indikator Kinerja dari 3(tiga) sasaran strategis dengan Realisasi 100 % keatas 2 (dua) Indikator dan 1 (satu) realisasi Indikator yang mencapai 100 %. Dengan rincian :

- 1) Target dengan Capaian realisasi diatas 100 % sebanyak 2 Target
- 2) Target dengan capaian realisasai 100% sebanyak 1 Target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai Upaya telah dilakukan seperti Untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil telah merencanakan beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- a. Memastikan pelaksana pelayanan termasuk front office telah menerapkan budaya BerAKHLAK;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana dalam menunjang pelayanan penerbitan administrasi kependudukan; dan
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan pelatihan hospitality bagi seluruh pegawai.

Untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik kepada Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan di atas menyebabkan realisasi anggaran tahun 2023 menjadi tinggi yaitu sebesar Rp. 6.338.283.044,- atau 98,36% dari pagu anggaran Rp. 6.443.957.850,-

Tindak lanjut atas rekomendasi dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah :

Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Kinerja telah di Publikasikan di Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (reward) karena belum ada payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment. Percepatan administrasi keuangan(SPJ)

- Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Triwulan TA. 2023 terhadap beberapa target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur yaitu :
  - a. Terdapat harga barang di E-Catalog yang lebih tinggi dari Harga di DPA-SKPD
  - b. Terdapat beberapa jabatan Struktural, fungsional penyetaraan yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
  - c. Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
  - d. Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
  - e. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat terkait persyaratan penerbitan dokumen kependudukan
  - f. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung penerbitan dokumen kependudukan.
- Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :
  - a. Percepatan proses pengadaan melalui E-Catalog
  - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
  - c. Meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan

- d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.
- e. Memaksimalkan penyebaran informasi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan melalui media sosial
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan public khususnya Masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik..

Malili, 26 Februari 2024

Mengetahui

**KEPALA DINAS**



**OKSEN BIJA, SH**

Pangkat : Pembina Utama muda  
NIP. 196510251996101001